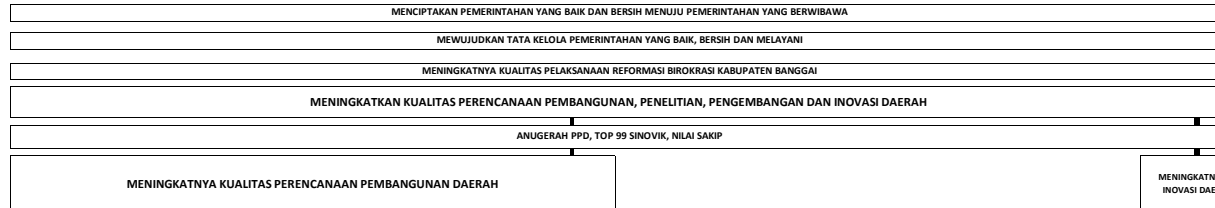




POHON KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RKPd TERHADAP RPJMD

MENINGKATKAN FASILITASI, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SECARA PARTISIPATIF DI DUKUNG DATA PEMBANGUNAN YANG UP TO DATE

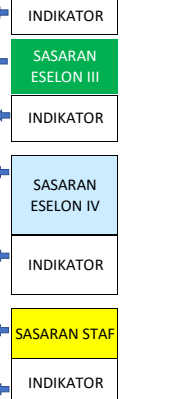
PERSENTASE PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES DAN TEPAT ISI										PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH										PERSIAPAN CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH									
<p>1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi</p> <p>2. Tersedianya data statistik daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>									

MENINGKATKAN SINKRONISASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

PERSENTASE KEBIJAKAN DAN PROGRAM PUSAT DI DAERAH YANG DI FASILITASI									
<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>									

PERSENTASE RENJA PERANGKAT DAERAH BERKUALITAS BAIK

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang										Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pembangunan Ekonomi										Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya										Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat										Meningkatkan Hasil Kelibangan yang Didukung dan Dikembangkan oleh PD										Meningkatkan Inovasi Daerah yang Didukung dan Dikembangkan oleh PD									
<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>										<p>1. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>2. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>3. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>4. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>5. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>6. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>7. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>8. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>9. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p> <p>10. Tersedianya informasi pembangunan daerah</p>									





POHON KINERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

MENCiptakan PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI

MENINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BANGGAI.

MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

ANUGERAH PPD, TOP 99 SINOVIK

MENINGKATNYA TATA KELOLA BAPPEDA LITBANG YANG BAIK, BERSIH DAN AKUNTABEL

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

% PENINGKATAN DISIPLIN ASN

MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN

MENINGKATNYA LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU

MENINGKATNYA DATA INFORMASI PERANGKAT DAERAH

MENINGKATNYA DISIPLIN ASN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG

PERSENTASE PEMANFAATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI

TINGKAT KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN

PERSENTASE KETERSEDIAAN DATA INFORMASI PERANGKAT DAERAH

CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Main performance tree table with 4 columns: Administration, Facilities, Reporting, and HR Services. Each cell contains a specific indicator, a brief description, and a measurement unit.

MISI

TUJUAN

SASARAN

TUJUAN ESSELON II

INDIKATOR TUJUAN ESSELON II

SASARAN ESSELON II

INDIKATOR SASARAN ESSELON II

SASARAN ESSELON III

INDIKATOR SASARAN ESSELON III

SASARAN ESSELON IV

INDIKATOR SASARAN ESSELON IV

SASARAN STAF

INDIKATOR SASARAN STAF